



KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Tuntunan dan BimbinganNya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu fondasi untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai wahana pertanggungjawaban kinerja yang berisi informasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun pertama dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sebagai wujud komitmen moral terhadap amanah yang diemban maka LKIP 2022 secara jujur, transparan dan akuntabel menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaannya. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 menjadi media informasi tentang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi tonggak untuk menggapai **"NTT BANGKIT MENUJU SEJAHTERA"**.

Semoga Tuhan memberkati upaya kita bersama dalam membangun Nusa Tenggara Timur tercinta.

Kupang, Maret 2023

GUVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran. LKIP adalah penjabaran dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Sebagai suatu kewajiban organisatoris, LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) Tahun 2022 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022.

Adapun Visi Pemprov NTT sesuai RPJMD 2018-2023 yaitu **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Visi tersebut dijabarkan dalam Misi yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan.

Tercapainya suatu program sejatinya merupakan upaya riil membumikan visi dan misi pemerintah Provinsi NTT. Dengan kata lain bila sebagian besar atau seluruh program Pemerintah Provinsi NTT dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka individu dan masyarakat NTT telah bangkit dan menjadi sejahtera. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan di daerah ini harus mendukung pencapaian setiap program. Untuk maksud ini, maka perlu ada petunjuk atau indikasi yang terukur, spesifik dan realistis yang secara nyata dan logis dapat menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mengimplementasikan suatu program.



Pencapaian Kinerja Sasaran Pemprov NTT tahun 2022 sesuai misi dan agenda secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2022

NO	MISI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SKALA ORDINAL
1.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	71,79	Cukup Berhasil
2.	Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)	82,49	Berhasil
3.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan	72,58	Cukup Berhasil
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	97,51	Sangat Berhasil
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	102,52	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN		85,37	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemprov NTT selama tahun 2022 dikategorikan **SANGAT BERHASIL**. Hal ini dapat terlihat dari indikator kinerja sasaran dari 5 (Lima) Misi yang mencapai 85,37 %. Meskipun dikatakan Sangat Berhasil namun ada beberapa Misi yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan yakni Misi I: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil dan Misi III: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang bersifat eksternal dan internal. Pemprov NTT akan mengambil langkah konstruktif dan konkrit terhadap target capaian kinerja yang belum menggembirakan agar terjadi perbaikan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu peran serta dan partisipasi masyarakat dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) mutlak diperlukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.

Akhirnya, dalam semangat kolaboratif Pemprov NTT bersama masyarakat dan segenap *stakeholder* bergandengan tangan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan “NTT Bangkit, NTT Sejahtera”.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi yang telah bergulir menghendaki terselenggaranya Pemerintahan yang bertanggungjawab dan bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* akan semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-hak sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan manajemen moderen telah membuktikan bahwa keterwujudan Pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dalam sebuah organisasi akan menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara di mata publik. Sebagai salah satu pilar Pemerintahan yang bersih, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara aktifitas organisasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pasal 18 ayat menyebutkan bahwa: Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Untuk itu mejadi keharusan organisasatoris bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi NTT untuk menyusun Laporan Akntabilitas Kinerja pada setiap tahun.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat atas tugas dan tanggung jawab pemerintah dari sisi perencanaan, hingga pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun serta hasilnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah:

- a. agar masyarakat mengetahui hasil kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2022

- b. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah atas perencanaan yang disusun, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah
- c. Sebagai media untuk mendapatkan umpan balik terhadap keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian kinerja sehingga dapat merumuskan strategi pemecahan masalah yang tepat guna peningkatan capaian kinerja Pemerintah Provinsi NTT secara berkelanjutan.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Strategis yang diperjanjikan sebagai penjabaran dari 5 (lima) Misi dan 63 (enam puluh tiga) Program.

Gambaran akuntabilitas kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN

Tujuan Misi ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (stakeholder) dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

Sasaran Strategis 1 : Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan

Sasaran strategis tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan mencakup tiga (3) indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	3,1	6,33-6,90	3,45	54,50 – 50,00	6,7	51,49



2.	Inflasi	%	1,67	3-3,2	6,65	(-21,67) – (-7.81)	3	(-21.67)
3.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	20,58	23-25	18,92	82,26 – 75,68	25-27	75,68 – 70,07
Rata-rata Capaian						42,98		

Sumber data: BPS NTT, 2023 dan Bank Indonesia triwulan III tahun 2022

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

a. Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pada tahun 2022 capaian Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) adalah sebesar 54,50% atau terealisasi 3,45 % dari target pesimis yang ditetapkan sebesar 6,33%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 6,90%, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada tahun 2022 hanya mencapai 50%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 0,35%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 6,7%, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) baru mencapai 51,49%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

PDRB ADHB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebesar Rp 118.718,20 miliar. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) NTT tahun 2022 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 29,60 persen. Berikutnya adalah dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 12,82 persen, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 12,05 persen. Dari sisi pengeluaran peningkatan didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan kelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran Covid-19 yang semakin mereda. Musim panen raya yang terjadi mendorong pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peningkatan aktivitas masyarakat di tengah

melandainya pandemi Covid-19 serta momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional turut mendorong dinamika Lapangan Usaha perdagangan besar dan eceran. Sementara itu, peningkatan Lapangan Usaha Konstruksi didorong oleh berlanjutnya proyek-proyek strategis pemerintah di Provinsi NTT.

2. Inflasi

a. Capaian Target Inflasi

Inflasi pada tahun 2022 adalah sebesar 6.65%. Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 3,2%, maka capaian indikator laju inflasi adalah sebesar (-7.81%), sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 3%, maka laju inflasi pada tahun 2022 mencapai (-7.81%). Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 1,67%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, laju inflasi pada tahun 2022 mencapai (-21.67)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,65 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya sebesar 1,67%. Inflasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 5,51 %. Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan *fuel surcharge* yang diterapkan kementerian perhubungan untuk angkutan udara serta penyesuaian tarif angkutan umum paska kenaikan harga BBM. Beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi tahun 2022. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang signifikan di awal Triwulan III tahun 2022.

3. PDRB Per Kapita

a. Capaian Target PDRB Per Kapita

PDRB per kapita pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18,92 Juta.

Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar Rp. 23 Juta, maka capaian PDRB per Kapita adalah sebesar 82,26%, jika dibandingkan dengan target optimis sebesar Rp. 25 juta, maka PDRB per kapita telah mencapai 75,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 1,66%. Jika dibandingkan dengan target optimis pada akhir RPJMD tahun 2023 sebesar Rp. 27 juta, maka PDRB per kapita pada tahun 2022 telah mencapai 70,07%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Penurunan PDRB per Kapita di Provinsi NTT disebabkan oleh Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah, kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang, dan turunnya daya beli masyarakat.

Sesuai penjelasan di atas, dari tiga indikator kinerja, rata-rata capaian sasaran strategis **"Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan"** sebesar 42,98 % dengan kategori belum berhasil.

Sasaran Strategis 2: Berkurangnya Kemiskinan

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	%	20,44	19,35-16,15	20,23	95,45-74,74	15-12	65,13-31,42
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	1.44	0,98	0,93	105,10	0,85	90,59
3.	Indeks Kedalam Kemiskinan	Poin	4,79	3,91	3,63	107,16	3,40	93,24
Rata-rata Capaian						102,57		

Sumber: BPS NTT, 2023



A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan

a. Capaian target presentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Pada tahun 2022 Persentase Penduduk Di bawah Garis Kemiskinan adalah sebesar 20,23%. Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 19,35%, maka capaian persentase penduduk dibawah garis kemiskinan adalah sebesar 95,45%, sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 16,15%, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan hanya mencapai 74,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 0,21%. Jika dibandingkan dengan target optimis pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 12%, maka Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan pada tahun 2022 hanya mencapai 31,42%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan angka kemiskinan sebesar 0,21% menjadi 20,05 persen atau sebanyak 1,13 juta orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 460.823 per kapita per bulan. NTT menduduki peringkat ke 32 nasional menyusul Provinsi Papua Barat dan Papua di urutan 33 dan 34. Permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bukan hanya pada jumlah atau persentasenya yang tinggi, tetapi juga pada disparitas antarwilayah yang sangat tinggi yang bisa dilihat pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, yaitu mencapai 32,51 % dan rendahnya angka kemiskinan di Kota Kupang yaitu 8,61 %. Adanya besaran variasi antar daerah menunjukkan bahwa tidak ada strategi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan kemiskinan mau tidak mau harus disesuaikan dengan tantangan spesifik di tiap daerah. Disparitas kemiskinan antardaerah bukan hanya terjadi dalam angka, tetapi juga dalam hal tantangan yang dihadapi. Daerah miskin pada umumnya juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-

masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak terdapat di daerah miskin.

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

a. Capaian target indeks keparahan kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,93 poin. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 0,98 poin, maka capaian indeks keparahan kemiskinan adalah sebesar 105,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 1,44 poin, terjadi penurunan sebesar 0,51 poin. Jika dibandingkan dengan target optimis pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 0,85 poin, maka Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2022 telah mencapai 90,59%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak sektor mengalami kontraksi. Kontraksi yang terjadi berkorelasi lurus dengan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah, kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang, dan turunnya daya beli masyarakat meskipun pengaruhnya kecil namun tetap berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin dan keparahan kemiskinan.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

a. Capaian target indeks kedalaman kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 3,63 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 3,91 poin, maka capaian indeks kedalaman kemiskinan adalah

sebesar 107,16 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 4,79 poin, terjadi penurunan sebesar 1,16 poin. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3,4 poin, maka indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 telah mencapai 93,24%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pada kurun waktu 2021-2022 indeks kedalaman kemiskinan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, sedangkan di perkotaan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan secara umum lebih besar dari indeks kedalaman kemiskinan perkotaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkotaan dengan garis kemiskinan perkotaan relatif lebih dekat apabila dibandingkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan dengan garis kemiskinan perdesaan. Diperlukan penguatan berbagai upaya yang telah berjalan selama ini, dan lebih dari itu diperlukan upaya khusus untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Oleh karena itu, secara progresif pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan dan mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melaksanakan sistem pemantauan terpadu terhadap berbagai program tersebut dengan target pencapaian output yang terukur dan tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran dalam implementasi program

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "**Berkurangnya Kemiskinan**" sebesar 102,57 % dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran Strategis 3 : Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktifitas Angkatan Kerja

Sasaran ini mencakup 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,77	2,5-1,9	3,54	58,40	1,9-1,5	13.68- (-36.00)
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,78	69,67	75,23	107,98	69,76	107,84
3.	Produktivitas Total Daerah	Rp. Juta	37,99	48,509	24,18	49,85	50,360	48,01
4.	Cakupan Pekerja Tanpa Upah yang dibandingkan Penduduk yang berkerja	% Cek lagi data nya	25,92	22,69	2,89	12,74	21,02	186,25
	Rata-rata Capaian					57,24		

Sumber data: BPS NTT, 2023 dan Bappelitbangda Provinsi NTT

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Capaian target tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 3,54%. Jika dibandingkan dengan target pesimis tahun 2022 sebesar 2,5 %, maka capaian pesimis Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 58,40%. Jika dibandingkan dengan target optimis tahun 2022 sebesar 1.9 %, maka capaian optimis Tingkat Pengangguran Terbuka hanya sebesar 13,68 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 3,77 %, terjadi penurunan sebesar 0,23%. Jika dibandingkan dengan target optimis pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 1,5%, maka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka masih sebesar -36%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Penurunan tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja sektor primer (pertanian kehutanan, perikanan), maraknya usaha transportasi online, serta banyaknya tenaga kerja yang telah dipekerjakan kembali pasca PHK yang dilakukan saat pandemi Covid. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka karena pandemi bergerak turun dan juga kewirausahaan terus bertumbuh namun belum cukup menekan angka pengangguran.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

a. Capaian Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 75,23%. Kondisi ini menggambarkan persentase banyaknya angkatan kerja usia di atas 15 tahun berbanding dengan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 69,67%, maka capaian TPAK adalah sebesar 107,98 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 73,78 %, terjadi peningkatan sebesar 1,45%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 69,76%, maka capaian TPAK telah mencapai 107,84%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), dengan jumlah pekerja sebanyak 1.414.841 orang. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian provinsi secara keseluruhan

3. Produktivitas Total Daerah

a. Capaian Target Produktivitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah merupakan output yang mampu dihasilkan oleh setiap angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2022 produktivitas total daerah adalah sebesar Rp. 24,18 Juta. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp. 48,509 Juta, maka capaian produktivitas total daerah adalah sebesar 49,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 37,99 juta, terjadi penurunan sebesar Rp 13,81 juta. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar Rp. 50,36 juta, maka capaian produktivitas total daerah mencapai 48,01%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Walaupun tingkat angkatan kerja meningkat dan tingkat pengangguran menurun, produktivitas total daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh PDRB per kapita yang menurun seiring dengan pendapatan yang menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah, kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang menuju kondisi stagflasi berujung turunnya daya beli masyarakat.

4. Cakupan Pekerja Tanpa Upah Yang Dibandingkan Dengan Penduduk Yang Bekerja

a. Capaian target cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja

Pada tahun 2022 cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebesar 2.89%. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) berbanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 22,69%, maka capaian cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja adalah sebesar 187,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 25,92%, terjadi penurunan sebesar 23,03%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada

tahun 2023 sebesar 21,02%, maka capaian cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja telah mencapai 186,25%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Turunnya cakupan perkerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk berkerja adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka yang disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja sektor primer (pertanian kehutanan, perikanan), maraknya usaha transportasi online, serta banyaknya tenaga kerja yang telah dipekerjakan kembali paska PHK yang dilakukan saat pandemi Covid.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "**Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktifitas Angkatan Kerja**" sebesar 57,24 % dengan kategori Belum Berhasil

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Sasaran ini didukung oleh satu indikator kinerja yaitu :

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	23,30	30,12	31,06	103,13	39,74	78,17
Capaian					103,13		

Sumber: LKIP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase PAD terhadap total pendapatan

a. Capaian target persentase pad terhadap total pendapatan

Capaian persentase PAD terhadap total pendapatan tahun 2022 adalah sebesar 103,13% atau terealisasi 31,06% dari target yang ditetapkan sebesar 30,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021, terjadi peningkatan

sebesar 7,76%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, Persentase PAD terhadap total pendapatan telah mencapai 78,17%. Rincian Pendapatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT
Keadaan 1 Januari s/d 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,908,984,931,665.00	1,363,729,389,742.12
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1,486,181,102,244.00	1,105,583,994,987.35
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	154,666,231,151.00	52,689,094,629.05
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	38,148,288,345.00	36,919,619,641.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6,196,425,326.00	7,950,406,532,
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3,110,242,996,000.00	3,018,444,461,241.74
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,110,242,996,000.00	3,018,444,461,241.74
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,196,425,326.00	7,950,406,532.00
4.3.			
4.3.1.	Pendapatan Hibah	6,196,425,326.00	7,950,406,532.00

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 (Data Sebelum Audit BPK)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Persentase PAD terhadap total pendapatan tahun 2022 meningkat sebesar 7,76%, namun jika dilihat dari tabel di atas, jumlah PAD pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan atau hanya mencapai 71,44% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 2) Kebijakan *refocusing* anggaran berdampak pada belanja

modal perangkat daerah yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi;

- 3) Rencana kerja sama dengan pihak ke-3 yang telah dijadikan sebagai obyek penerimaan tidak terealisasi;
- 4) Belum tersedianya Produk Hukum bagi obyek retribusi baru.

Sasaran Strategis 5: **Menguatnya Peranan NTT Dalam Perdagangan Regional**

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	Poin	-48,96	63,23	-42,84	-67,75	63,10	-67,10
Capaian					-67,75		

Sumber data: BPS NTT, 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

a Capaian target rasio ekspor impor terhadap pdrb (indikator keterbukaan ekonomi)

Rasio ekspor impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Pada tahun 2022 sebesar -42,84 poin. Kondisi ini menggambarkan jumlah produk yang diekspor lebih sedikit dari jumlah produk yang diimpor berbanding PDRB. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 63,23 poin, maka capaian Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB adalah sebesar -67,75 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar -48,96 poin, terjadi penurunan sebesar 6,12 poin. Jika dibandingkan dengan target pada akhir

RPJMD pada tahun 2023 sebesar 63,10 poin, maka capaian rasio ekspor impor terhadap PDRB sebesar -67,89%.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pencapaian Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) masih berada pada poin minus disebabkan karena masih banyak kebutuhan produk yang belum mampu diproduksi sendiri sehingga mengakibatkan besarnya nilai produk yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan di Nusa Tenggara Timur. Selain itu terdapat *raw material* sebagai bahan dasar produksi yang juga diimpor dari luar untuk mendukung kelancaran proses produksi di Nusa Tenggara Timur. Adapun komoditas yang di ekspor luar negeri provinsi NTT pada tahun 2022 mencapai USD 11,87 juta dengan negara tujuan utama adalah Timor Leste, Tiongkok dan Vietnam. Komoditas ekspor utama provinsi NTT didominasi kelompok biji-bijian berminyak.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "Menguatnya Peranan NTT Dalam Perdagangan Regional" sebesar -67,75% dengan kategori belum berhasil.

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Ketergantungan	Orang	54,88	62,79	55,65	88,62	62,08	89,64
Capaian					88,62		

Sumber data: BPS NTT 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Rasio Ketergantungan**

a. **Capaian target rasio ketergantungan**

Realisasi rasio ketergantungan tahun 2022 sebesar 55,65% dari target yang ditetapkan sebesar 62,79% atau tercapai 88,62%. Kondisi ini menggambarkan setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 56 penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun). Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, maka terjadi peningkatan sebesar 0,77%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, rasio ketergantungan telah mencapai 89,64%

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Total Fertility Rate (TFR) Provinsi NTT / jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada usia produktif di provinsi NTT tahun 2022 sebanyak 3 orang anak, hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk usia non produktif (15 tahun ke bawah). Kondisi ini ikut mempengaruhi rasio ketergantungan. Kedua, Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup NTT pada tahun 2022 sebesar 67,47 tahun, hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk usia non produktif (60 tahun keatas). Kondisi ini ikut mempengaruhi rasio ketergantungan.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "**Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat**" sebesar 88,62% dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	67,9	69	75,30	109,13	88	85,57
Capaian					109,13		

Sumber data: LKIP Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. NTT Tahun 2022

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Capaian target pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor pola pangan harapan menggambarkan tingkat keberagaman konsumsi masyarakat. Adapun angka ideal bagi skor adalah 100 poin. Untuk mencapai angka ideal 100 poin apabila pola konsumsi penduduk NTT telah mencapai pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Capaian pencapaian skor PPH tahun 2022 adalah sebesar 109,13 % atau terealisasi 75,30 poin dari target yang ditetapkan sebesar 69 poin. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 7,4 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 88 poin, Pencapaian Skor PPH telah mencapai 85,57%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Peningkatan pola pangan harapan pada tahun 2022 sangat dipengaruhi pola konsumsi energi (karbohidrat), protein, sayur dan buah.

- Konsumsi Energi (Karbohidrat)

Konsumsi energi penduduk NTT di tingkat rumah tangga mengalami peningkatan dari 1.918 kkal/kap/hari pada

tahun 2021 menjadi 1.974 kkal/kap/hari di tahun 2022. Angka konsumsi energi ini masih rendah atau belum mencukupi apabila dibandingkan angka kecukupan energi yang ditetapkan WNPG yaitu 2.100 kkal/kap/hari, namun tergolong normal. Tetapi konsumsi energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian yaitu beras dan terigu. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk meningkatkan konsumsi energi penduduk NTT dari komoditi sumber energi/karbohidrat dari kelompok lainnya seperti jagung, sorghum dan umbi-umbian.

- **Konsumsi Protein (Nabati dan Hewani)**

Konsumsi protein penduduk NTT di tingkat rumah tangga mengalami peningkatan dari 54,9 gram/kap/hari pada tahun 2021 menjadi 55,4 gram/kap/hari di tahun 2022. Jika dibandingkan angka kecukupan protein yang ditetapkan WNPG, yaitu 57 gram/kap/hari, maka konsumsi protein penduduk NTT masih perlu ditingkatkan. Komposisi Konsumsi Protein penduduk NTT Tahun 2022 tersebut (55,4 gram/kap/hari), terdiri dari 68,72% atau 38,07 gram Protein asal Pangan Nabati dan 31,28% atau 17,33 gram Protein asal Pangan Hewani.

- **Konsumsi Sayur dan Buah**

Konsumsi sayur dan buah penduduk NTT di tingkat rumah tangga mengalami peningkatan dari 72,0 kilogram/kap/tahun pada tahun 2021 menjadi 76,3 kilogram/kap/tahun di tahun 2022. Apabila dibandingkan angka kecukupan sayur dan buah yang ditetapkan WNPG yaitu 91,25 kilogram/kap/tahun (Sayur: 58,03 kilogram/kap/tahun dan buah: 33,22 kilogram/kap/tahun), maka konsumsi sayur dan buah penduduk NTT masih perlu ditingkatkan. Komposisi Konsumsi sayur dan buah penduduk NTT Tahun 2022 tersebut (76,3 kilogram/kap/tahun), terdiri dari 68,41% atau 52,2 kilogram/kap/tahun pangan asal sayur dan 31,58% atau 24,1 kilogram/kap/tahun asal pangan buah.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **“Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan”** sebesar 109,13% dengan kategori

sangat berhasil.

Sasaran Strategis 8 : Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Indeks Gini	Poin	0,34	0,34-0,33	0,34	100-96.97	0,34 - 0,32	100-93.75
Capaian								

Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka 2023, BPS Provinsi NTT Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Gini

a. Capaian Target Indeks Gini

Indeks Gini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat di NTT. Realisasi Indeks Gini tahun 2022 adalah sebesar 0,34 poin. Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 0,34 poin, maka capaian Indeks Gini sebesar 100% atau sama dengan realisasi tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 0,33 poin maka capaian Indeks Gini sebesar 96,97 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 untuk kategori pesimis sebesar 0,34, maka capaian Indeks Gini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 untuk kategori optimis sebesar 0,32 poin, maka capaian Indeks Gini sebesar 93,75%.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Indeks gini tidak mengalami perubahan meskipun terjadi penurunan angka penduduk miskin sebagai akibat pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19. Hal ini disebabkan karena penurunan penduduk miskin tidak signifikan atau hanya berkisar 0,21%.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis “**Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah**” sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran Strategis 9 : Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran ini mencakup empat indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92.63	95	96,47	101,55	95	101,5
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	74.53	72,76	74.53	102,43	74,76	99,69
3.	Persentase Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani	%	100	80	92,72	115,90	100	92,72
4.	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	%	100	80	98,34	122,93	100	98,34
Rata-rata Capaian						110,70		

Sumber data: LKIP DP3A Prov.NTT Tahun 2022 dan BPS NTT Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

a. Capaian Target Indeks Pembangunan Gender

Realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 sebesar 96,47% dari target yang ditetapkan sebesar 95% atau tercapai 101,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 3,84%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, Indeks

Pembangunan Gender telah mencapai 92,72%.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Angka Harapan Hidup yang semakin membaik, peningkatan cakupan pendampingan gender dan adanya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

2. Indeks Pemberdayaan Gender

a. Capaian Target Indeks Pemberdayaan Gender

Capaian target indeks pemberdayaan gender adalah realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 sebesar 74,53% dari target yang ditetapkan sebesar 74,53% atau tercapai 100%. Realiasi Indeks Pemberdayaan Gender tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, Indeks Pemberdayaan Gender telah mencapai 92,72%.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen.

3. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani

a. Capaian Target Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani

Realisasi persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani tahun 2022 sebesar 92,72% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau tercapai 115,50%. Total kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani yaitu 548 kasus dari 591 kasus yang tercatat. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 7,28%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 100 telah mencapai 92,72%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Meningkatnya penyelesaian atas berbagai kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan semakin tingginya kesadaran dan dukungan masyarakat yang diberikan kepada aparat kepolisian atau pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan anak. Kesadaran tersebut timbul akibat masyarakat menyadari anak memiliki hak asasi yang sama di antaranya hak memperoleh kehidupan dan perlakuan yang adil, tidak ada intimidasi atau mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Bentuk perhatian pemerintah dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak adalah melaksanakan program membangun desa/kelurahan layak anak yang sebelumnya tidak ada. Saat ini sudah terbangun 163 desa/kelurahan layak anak yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Sikka Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai Barat, Belu, Kupang dan TTU. Selanjutnya, Pemerintah membentuk satgas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di setiap kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, Pol-PP, Banbinsa, Pospol, Polsek, Polres dan berbagai lembaga non Pemerintah pemerhati tenaga kerja; serta peningkatan peran dan pemberdayaan gender. Pemerintah menyadari bahwa kemiskinan juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminal termasuk kekerasan terhadap anak, sehingga dialokasi dana pengembangan ekonomi bagi UMKM dan usaha ekonomi produktif yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, kesejahteraan sosial, pendidikan, peternakan.

4. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Tertangani

a. Capaian target persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani

Realisasi persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani tahun 2022 sebesar 98,34% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau tercapai 122,93%. Total kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani yaitu 593

kasus dari 603 kasus yang tercatat. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 1,66%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani telah mencapai 98,34%.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Meningkatnya penyelesaian atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan semakin tingginya kesadaran dan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan perempuan. Kesadaran dan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan perempuan.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** sebesar 71,79 % dengan Kategori Cukup Berhasil.

B. Analisis dukungan Program dan Anggaran dalam pencapaian Misi

Keberhasilan Misi satu : **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** didukung oleh 40 (empat puluh) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.212.529.483,- (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 122.357.676.998,- (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) atau 86,65%

Tabel
Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI
MISI I			
1	2	3	4
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,293,652,300	1,261,707,900
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17,358,941,660	15,872,237,110
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,964,540,240	3,856,073,468
4	Penyuluhan Pertanian	2,116,651,000	1,651,967,213

5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	242,572,500	220,667,085
6	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,584,267,800	2,375,647,116
7	Pengelolaan Perikanan Tangkap	22,544,326,600	21,418,060,866
8	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4,446,803,900	4,114,811,400
9	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	432,021,050	388,656,831
10	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	596,282,600	594,666,200
11	Penempatan Tenaga Kerja	138,670,000	120,969,100
12	Hubungan Industrial	121,702,240	106,162,840
13	Pengawasan Ketenagakerjaan	9,200,000	9,200,000
14	Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	5,044,967,360	4,149,909,448
15	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	3,240,130,200	3,019,194,130
16	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	42,197,500	36,961,200
17	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	230,157,800	225,817,300
18	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	352,554,870	332,107,010
19	Penataan Desa	62,158,100	58,176,400
20	Administrasi Pemerintah Desa	1,666,273,680	1,379,095,622
21	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	48,429,100	33,274,200
22	Promosi Penanaman Modal	273,207,100	253,270,880
23	Pelayanan Penanaman Modal	478,968,000	346,090,420
24	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	721,864,250	592,311,200
25	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6,394,800	6,394,800
26	Pemberdayaan Sosial	2,560,179,650	1,979,806,650
27	Rehabilitas Sosial	9,998,984,876	9,600,899,383
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial	31,053,535,400	23,590,408,388

29	Penanganan Bencana	465,318,800	147,742,944
30	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,103,846,531	1,620,945,359
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,701,288,172	2,983,938,844
32	Penelitian dan Pengembangan Daerah	870,414,227	558,011,104
33	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,264,749,031	1,878,969,095
34	Pengelolaan Pendapatan Daerah	18,531,484,846	17,156,734,484
35	Pengarusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	131,235,850	100,771,770
36	Perlindungan Perempuan	124,999,900	48,880,000
37	Peningkatan Kualitas Keluarga	70,854,950	32,746,800
38	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	26,594,000	26,294,000
39	Pemenuhan Hak Anak	191,906,100	118,371,159
40	Perlindungan Khusus Anak	100,202,500	89,727,279
TOTAL ANGGARAN		141,212,529,483	122,357,676,998

Sumber: LKIP Perangkat daerah Provinsi NTT tahun 2022

Misi 2 : MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (*RING OF BEAUTY*)

Pariwisata merupakan masa depan ekonomi karena mempunyai *multiplier-effect*. NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. NTT merupakan provinsi dengan destinasi unggulan terbanyak dan menjadi destinasi super prioritas di Indonesia, sehingga menjadi pilihan utama wisata dunia akhir-akhir ini. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. NTT yang kaya akan aset alam dan budaya dengan 1.192 pulau dan 1.378 destinasi wisata dengan segala otentisitas keunikannya baik daratan maupun perairan merupakan rangkaian cincin keindahan (*ring of beauty*). Untuk itu Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pariwisata sebagai *prime mover* (penggerak utama) pembangunan ekonomi. Kepariwisata meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, obyek dan daya tarik wisata serta usaha lainnya yang terkait.

Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah dan keberagaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Keberhasilan pengembangan kepariwisataan dapat diukur dari jumlah kunjungan wisatawan.

Misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama ekonomi dalam mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera. Misi ini didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

Sasaran Pengembangan Pariwisata NTT Melalui Pemenuhan Unsur 5A Strategis 1 : Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accomodation, Amenities dan Awareness*) Dengan Pola Pendekatan Kawasan

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,55	0,77	0,62	80,52	0,78	79,48
2.	Share Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	11,16	12,18	12,05	98,93	12,23	98,53
3.	Share Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB	%	1,69	2,32	1,67	71,98	2,45	68,16
Rata-rata Capaian Sasaran						83,81		

Sumber : BPS NTT, 2023



A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

a. Capaian Target capaian share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB

Pada tahun 2022 target kontribusi / share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 0,77%, dengan realisasi sebesar 0,62% sehingga capaiannya 80,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0,55% maka terjadi peningkatan sebesar 0,07%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,78% maka capaiannya sebesar 79,48 %.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Meskipun pada tahun 2022 obyek pariwisata di Provinsi NTT kembali dibuka setelah selama hampir 2 tahun ditutup sebagai akibat dari pandemi covid'19 namun hal ini tidak serta merta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB khususnya berkaitan dengan kontribusi / share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB. Hal ini disebabkan karena kunjungan wisatawan belum meningkat secara signifikan. Masih ada keengganan wisatawan untuk berkunjung ke NTT karena dihantui ketakutan terhadap keganasan covid-19 yang merenggut banyak jiwa. Faktor penyebab lainnya adalah masih berlakunya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat) yang membuat wisatawan mengurungkan niatnya untuk datang ke NTT.

2. Share Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

a. Capaian target share sektor perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2022 target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 12,18% dengan realisasi sebesar 12,05% (30.417.526.960) atau mencapai 98,53%. Jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2021 sebesar 11,16% maka terjadi kenaikan sebesar 0,89%. Jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD sebesar 12,23 % maka capaiannya sebesar 98,53%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian besar usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan, adalah pertumbuhan pada perdagangan besar dan eceran termasuk penjualan kendaraan bermotor. Maraknya penjualan online yang digunakan oleh masyarakat NTT dalam memperdagangkan usahanya turut berkontribusi terhadap peningkatan PDRB. Selain itu terdapat faktor yang dapat menghambat pertumbuhan perdagangan yakni meningkatnya harga barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting pada saat tertentu dikarenakan kelangkaan persediaan.

2. Share Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB

a. Capaian target share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB

Pada tahun 2022 target share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 2,32 dengan realiasi sebesar 1,67 %, sehingga capainya sebesar 71,98%. Jika dibandingkan realiasi tahun 2021 sebesar 1,69% maka terjadi penurunan sebesar 0,02%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,45 maka capaiannya sebesar 68,16%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Kategori jasa lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB,

Badan Regional, IMF, OECD. Pandemi Covid'19 berdampak terhadap dunia usaha dimana banyak usaha termasuk tempat hiburan, rekreasi terpaksa harus ditutup sebagai akibat dari maraknya penyebaran Covid-19. Adanya kebijakan PPKM membuat dunia usaha menjadi lesu. Kondisi ini berdampak terhadap menurunnya kontribusi dunia usaha terhadap PDRB.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yakni: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel
Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Perangkat Daerah
1.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	334.129.000	327.170.400,9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	270.816.000	157.777.460	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.133.545.540	1.278.081.382	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	343.056.100	298.627.740	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Daam Negeri	3.406.301.000	3.404.459.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah	5.487.847.640	5.466.116.682	

Sumber: LKIP perangkat daerah tahun 2022

Sasaran Strategis 2 : Menguatnya Sumbangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Sasaran ini mencakup tiga indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah wisata	%	6	6	48,64	100	8	608
2.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,73	4	2,02	50,50	4	50,5
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	658.270	1.278,453	1.189.149	93,01	1,534,144	77,51
Rata-rata Capaian Sasaran						81,17		

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan UMKM dan IKM di Daerah Pariwisata

a. Capaian target pertumbuhan UMKM dan IKM di daerah pariwisata

Pada tahun 2022 target pertumbuhan UMKM dan IKM di daerah pariwisata sebesar 48,64 (86.928 jenis usaha) dari target sebesar 6% sehingga capaiannya 800,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 6%, maka terjadi kenaikan sebesar 42,64% (5.216 jenis usaha). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8%, maka capaiannya 608%.

Tabel
Data Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata Tahun 2022

NO	TOTAL BERDASARKAN SUB SEKTOR	PERSENTASE
1.	Kuliner	64,62
2.	Kria	12,73
3.	Fesyen	16,82
4.	TV dan Radio	0,23
5.	Penerbitan	2,34
6.	Musik	0,45
7.	Arsitektur	1,04
8.	App & Games	0,07
9.	Periklanan	2,34
10.	Fotografi	0,94
11.	DKV	0,00
12.	Seni Pertunjukan	0,20
13.	Desain Produk	0,02
14.	Seni Rupa	0,29
15.	Film, Animasi, Video	0,06
16.	Desain Interior	0,11

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Salah satu kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah bertumbuhnya UMKM dan IKM di daerah wisata. Tahun 2022 menjadi awal kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi.covid-19. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke berbagai daerah tujuan wisata di NTT maka sektor UMKM dan IKM di daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pesatnya pertumbuhan UMKM dan IKM terebut menandai kebangkitan usaha ekonomi kreatif setelah kurang lebih 2 tahun mengalami kelesuan. Trend pertumbuhan ini diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun mengalami pertumbuhan, namun tantangan industri pariwisata saat ini adalah bagaimana meningkat kembali jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemi sehingga dapat membantu keadaan ekonomi Negara. Data CSIS menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi secara umum di Indonesia jika covid'19 tidak tertangani secara maksimal akan berkisar pada 0-1,99 %. Namun jika masih dapat tertangani akan berada di kisaran 4-4,99% dan masih dibawah target pertumbuhan ekonomi

yang ditetapkan pemerintah yaitu 5,3%. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari UMKM dan IKM yang bisa menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas untuk dipasarkan.

2. Lama Tinggal Wisatawan

a. Capaian Target Lama Tinggal Wisatawan

Pada tahun 2022 target lama tinggal wisatawan di NTT selama 4 hari dengan realisasi 2,02 hari sehingga capaiannya 50,5 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 2,71 hari maka terjadi penurunan 0,71 hari. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD selama 4 hari maka capaiannya sebesar 50,5 persen.

b. Faktor -faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan keberhasilan suatu daerah memanfaatkan sektor wisata sebagai peluang perkembangan ekonomi. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya tahun 2022 merupakan tonggak penting dimulainya kembali aktivitas di sektor pariwisata. Perjalanan kembali dibuka dan berbagai aktivitas mulai dilaksanakan secara normal. Meskipun jumlah kunjungan wisata meningkat namun hal ini tidak berbanding lurus dengan lama tinggal wisatawan. Hal ini disebabkan karena wisatawan masih beradaptasi dengan kondisi baru pasca pandemi sehingga banyak wisatawan yang cepat pulang setelah mereka melakukan kunjungan di daerah tujuan wisata. Dampaknya adalah lama kunjungan wisatawan yang diharapkan bisa mencapai 4 hari hanya mencapai 2,02 hari.

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

a. Capaian Target Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada tahun 2022 target jumlah kunjungan wisatawan di NTT sebanyak 1.189.149 orang dari target 1.278.453 orang sehingga capaiannya sebesar 93,01 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 658.270 orang maka terjadi kenaikan 530.879 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

sebesar 1,534,144 maka capaiannya sebesar 77,52 %.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata di suatu daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Tantangan industri pariwisata saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak cukup besar pada arus kunjungan wisata ke NTT. Hal ini dibuktikan dengan angka kunjungan wisatawan ke NTT menurun drastis pada tahun 2020-2021. Dunia pariwisata mengalami kelesuan selama 2 tahun dengan adanya berbagai peraturan pembatasan perjalanan, *social distancing* dan *work from home*. Baru pada tahun 2022 kunjungan wisatawan ke NTT mengalami peningkatan seiring dibukanya kembali obyek wisata untuk dikunjungi meskipun belum signifikan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi melalui beberapa strategi antara lain membuat kampanye aktivasi transisi *new normal* untuk mengajak wisatawan domestik berwisata dalam negeri dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap destinasi pariwisata NTT dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan: *Cleanliness, Healty, Safety and Enviromental Sustainability* (CSHE). Dampaknya sangat terasa sehingga pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan wisata sebanyak 1.189.149 orang.

Tabel
Program, kegiatan dan anggaran

No	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi
1.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	768.791.100	743.230.149
2.	Dinas Pariwisata dan Ekonmi Kreatif	Pemasaran Pariwisata	1.104.827.600	1.018.371.930
		Jumlah	1.873.618.700	1.761.602.079

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rinciannya sebagai berikut:

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty*)”** sebesar **82,49 % dengan Kategori Berhasil**, yang didukung dengan dua sasaran dan 7 (tujuh) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.361.466.340 dan realisasi Rp. 7.227.718.761 atau mencapai 98,18%.

**Misi 3 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial, ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolasi.

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah
dan Keluar Daerah**

Sasaran ini, mencakup tiga (3) indikator sebagai berikut:

Tabel 17
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	71,61	100	89,42	89,42	100	89,42

2.	Dwealing Time Pelabuhan	hari	4	4	4	100	3	133,33
3.	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	10,05	45,60	14,41	31,59	74,81	19,26
Rata-rata Capaian Sasaran						73,67		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, LKIP Dinas Perhubungan Provinsi NTT, 2022

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

a. Capaian Target Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Pada tahun 2022 target persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 2.650 Km atau 100%, dengan realisasinya sepanjang 2.369,887 Km atau 89,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sepanjang 1.897,85 Km atau 71,61%, maka capaian panjang jalan provinsi kondisi mantap sampai tahun 2022 yaitu 2.369,887 Km atau 89,42 %. jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD 2023 sebesar 100% atau 2.650 Km maka capaiannya sebesar 2.369,887 Km atau 89,42 %.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap tergolong belum mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2022, yaitu :

1. Adanya pelaksanaan paket-paket kegiatan dengan sumber dana DAK selama 2 (dua) tahun yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena terjadi penurunan alokasi dana DAK bidang jalan.
2. Beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai ketentuan kontrak sehingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan pekerjaan diusulkan untuk dilakukan dalam tahun anggaran berikutnya.
3. Terjadi kenaikan harga BBM dan aspal yang mempengaruhi

kemampuan keuangan penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Curah hujan cukup tinggi pada beberapa titik lokasi pekerjaan paket-paket tertentu sehingga mengganggu metode pekerjaan di lapangan yang mengakibatkan penyedia jasa diberikan addendum

2. Dwealing Time Pelabuhan

a. Capaian Target Dwealing Time Pelabuhan

Pada tahun 2022 target *dwealing time* pelabuhan yaitu 4 hari dengan realisasinya 4 hari. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sepanjang yaitu 4 hari, maka capaian sampai tahun 2022 yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 yaitu 3 hari maka capaiannya sebesar 133,33 %.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator kinerja Dwealing time pelabuhan memenuhi target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2022, yaitu :

1. Pengawasan di pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat (*dwealing time*) dengan penambahan anggaran pada kegiatan pengawasan sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat pengguna serta menimbulkan biaya yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di pelabuhan.
2. Menjaga komunikasi dengan petugas-petugas yang berada di pelabuhan dan UPT Kementerian yang memiliki wilayah kerja di pelabuhan target serta BUMN penyelenggara kegiatan bongkar/muat peti kemas di pelabuhan agar kegiatan pelayanan tetap berjalan dengan baik.

3. Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

a. Capaian target Cakupan Pelayanan Angkutan Darat

Pada tahun 2022 target cakupan pelayanan angkutan darat sebanyak 272 trayek atau 45,60% dengan realisasinya sebanyak 86 trayek atau 14,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 60 trayek atau 10,05%, maka capaian cakupan

pelayanan angkutan darat sampai tahun 2022 yaitu sebesar 31,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebanyak 74,81% atau 597 trayek maka capaiannya sebesar 19,26%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Indikator cakupan pelayanan angkutan darat merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pehubungan Provinsi NTT tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 sebanyak 597 trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2019 namun sampai dengan Tahun 2021 trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh angkutan baik perintis maupun eksekutif. Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan realisasi jumlah trayek yang dilayani oleh angkutan umum AKDP sebanyak 86 trayek belum memenuhi target yang ditetapkan Tahun 2022 sebanyak 272 trayek. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2022, yaitu : pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan-kegiatan ini sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan transportasi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Luar Daerah, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 3 program pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Penyelenggaraan Jalan	899.965.086.150	838.143.053.083	93,13
2.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.719.534.323	4.483.062.692	94,98
		Program Pengelolaan Pelayaran	31.495.872.800	29.873.860.362	94,85

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Luar Daerah” sebesar 199,95%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 2 program oleh 2 perangkat daerah Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 936.180.493.273,- dan realisasi sebesar Rp. 872.499.976.17,- atau mencapai 94,32%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT sangat berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 2 : Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung peningkatan produksi pertanian

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani	%	7,26	64,42	71,10	57,96	78,46	90,61
Capaian Sasaran					57,96		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, 2022

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani

a. Capaian Target Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani

Pada tahun 2022 target persentase pembangunan jaringan irigasi bagi petani sebesar 38.863,30 Ha atau 64,42%, dengan realisasinya sebesar 695,50 Ha atau 71,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 7,26%, maka capaian persentase pembangunan jaringan irigasi bagi petani sampai tahun 2022 sebesar 34.963,58 Ha atau 57,96%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 78,46% maka capaiannya sebesar 90,61%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator persentase pembangunan jaringan irigasi bagi petani telah mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2022, yaitu : melalui rehabilitasi jaringan irigasi di 5 DI yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Manggarai, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur melalui dana DAK dengan target luas pengaruh penanganan 978,11 Ha dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar 71,10% atau 695,50 Ha. Untuk menjaga dan meningkatkan fungsi layanan saluran irigasi secara optimal berdasarkan klasifikasi maka penanganan saluran irigasi terbagi

ke dalam klasifikasi, yaitu irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier dan irigasi kwartier.

Adapun jenis rehabilitasi jaringan irigasi di Tahun 2022 meliputi :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 di Kabupaten Manggarai seluas 161 Ha (DAK).
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat seluas 229,43 Ha (DAK).
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waekelo Sawah di Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 210,5 Ha (DAK).
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mataiayang di Kabupaten Sumba Timur seluas 194,2 Ha (DAK).

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Melolo di Kabupaten Sumba Timur seluas 183 Ha (DAK).

B. Analisis program anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2022, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.375.526.523,- dan realisasi sebesar Rp. 44.702.556.413,- atau mencapai 80,73%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis **“Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung peningkatan produksi pertanian”** sebesar 57,96%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT cukup berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			Indikator Kinerja	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	21.576	9,238	-	-	47,948	21.576
2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak	%	82	85	69,82	59,35	100	69,82
3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	69,7	80	-	-	100	69,7
Rata-rata Capaian Sasaran						59,35		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, 2022

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Rumah Layak Huni

a. Capaian Target Penambahan Rumah Layak Huni

Pada tahun 2022 target penambahan rumah layak huni sebanyak 9.238 unit, dengan realisasinya 0 unit karena indikator penambahan rumah layak huni tidak dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 21.576 unit, maka capaian penambahan rumah layak huni di tahun 2022 tidak mencapai target. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebanyak 47.948 unit maka capaiannya baru sebesar 21.576 unit.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator penambahan rumah layak huni belum mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2022, yaitu :

1. Indikator penambahan rumah layak huni merupakan indikator

kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023.

2. Capaian penambahan rumah layak huni tahun 2022 tidak terealisasi dari target tahun 2022 sebesar 9,238 unit. Hal ini karena penanganan rumah layak huni dilakukan dan direalisasikan hanya sampai tahun 2019 dengan jumlah rumah terbangun sebanyak 403 unit. Selanjutnya mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 maka indikator yang berkaitan dengan penyediaan rumah difokuskan pada penyediaan rumah korban bencana dan penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

2. Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak

a. Capaian Target Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak

Pada tahun 2022 target persentase rumah tangga menurut air layak sebesar 85% atau 16.726 KK, dengan realisasinya sebesar 69,82% atau 11.726 KK. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 21.576 unit, maka capaian persentase rumah tangga menurut air layak di tahun 2022 sebesar 59,35% atau 11.726 KK. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 100%, maka capaiannya baru sebesar 69,82%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator persentase rumah tangga menurut air layak belum mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2022, yaitu :

1. Melakukan berbagai upaya yang ditujukan selain untuk menjawab capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum juga dilakukan dengan memenuhi sasaran kinerja yang menjadi prioritas pembangunan daerah antara lain penurunan angka stunting, penurunan tingkat kemiskinan dan pembangunan pada daerah-daerah strategis provinsi untuk kebutuhan masyarakat termasuk di dalamnya dukungan terhadap daerah destinasi wisata.

2. Kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber dilakukan pemerintah daerah antara lain melalui PT SMI sehingga sejak tahun anggaran 2021 hingga tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pembangunan dan penyediaan SPAM yang menunjang akses air minum layak bagi masyarakat di beberapa Kabupaten/Kota dengan mekanisme multi years.
3. Intervensi pembangunan air minum ditujukan pada daerah wisata, stunting dan kemiskinan, KSP dan daerah-daerah di Provinsi NTT yang rawan terhadap ketersediaan air.

3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak

a. Capaian Target Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak

Indikator persentase rumah tangga menurut sanitasi layak merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Capaian persentase rumah tangga menurut sanitasi layak tahun 2022 tidak terealisasi dari target tahun 2022 sebesar 80%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan terkait indikator ini pada tahun 2022 belum dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator persentase rumah tangga menurut sanitasi layak belum dapat dilakukan pada tahun 2022 oleh karena keterbatasan anggaran.

B Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2022, yaitu Program Pengembangan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.005.925.108,- dan realisasi sebesar Rp. 64.672.860.326,- atau mencapai 92,38%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi”** sebesar 59,35%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT cukup berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Elektrifikasi	%	91,42	92	92,58	156,91	85	108,91
Capaian Sasaran					156,91		

Sumber data: LKIP Dinas ESDM Provinsi NTT, 2022

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Elektrifikasi

a. Capaian Target Rasio Elektrifikasi

Pada tahun 2022 target Rasio Elektrifikasi sebesar 92%, dengan realisasinya sebesar 92,58%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 91,42%, maka capaian Rasio Elektrifikasi di tahun 2022 sebesar 156,91%. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 85% maka capaiannya sebesar 108,91%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator rasio elektrifikasi telah mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2022, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan energi listrik khusus bagi masyarakat tidak mampu/miskin melalui kerjasama dengan PLN.
2. Dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data antara Dinas ESDM dengan BAPPENAS yaitu terkait data 3T dan kementerian Sosial terkait BDT (Basis Data Terpadu) yang nantinya menjadi rujukan untuk Dinas ESDM melaksanakan hibah bantuan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3. Belanja hibah instalasi sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu di 10 Kabupaten sebanyak 1035 unit.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2022, yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.760.676.200,- dan realisasi sebesar Rp. 1.644.010.165,- atau mencapai 93,37%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis **“Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi”** sebesar 156,91%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT sangat berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,28	75,42	-	-	75,66	96,85
Capaian Sasaran					-		

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2022



A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Capaian Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 tidak terealisasi dari target Tahun 2022 sebesar 75,42 poin. Pada Tahun 2022 indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tidak tercapai karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT tidak melakukan kegiatan pemantauan (pengambilan sampel serta pengujian di laboratorium) kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut sehingga dalam perhitungan nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi NTT Tahun 2022 masih menggunakan data hasil pemantauan (pengambilan sampel serta pengujian laboratorium) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.515.409.500 ,-	Anggaran ini tidak terealisasi karena Direfocusing sebesar 2.331.924.300,- sisanya untuk biaya operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	-

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2022

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah**” sebesar 0%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT belum berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Sasaran 6 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel

Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ₂ ^{eq}	Tidak dilaksanakan	17.248.829	-	-	17.248.829	-
Capaian Sasaran					-		

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2022

A. Analisis terhadap Indikator kinerja Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) adalah sebagai berikut:

Indikator ini tidak dilaksanakan karena ketiadaan anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

B. Analisi progam, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi) menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan	42.634.500,-	Anggaran ini tidak dilaksanakan karena Direfocusing	-

Sumber: LKIP dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca” sebesar 0%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT belum berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang

Sasaran 7 (tujuh) mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel

Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang	%	22,85	85	-	-	25,32	90,24
Capaian Sasaran					-		

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang

- a. Capaian Indikator Sasaran Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang Tahun 2022

Capaian Indikator Sasaran Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang Tahun 2022 tidak terealisasi dari target Tahun 2022 sebesar 85%.

Terkait indikator ini di Tahun 2022 tidak dilaksanakan dikarenakan sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan KSP sampai dengan Tahun 2022, walaupun dari tahun 2019 sudah dilakukan melalui Program/Kegiatan Penyusunan RTR KSP, dengan target penanganan tahun 2019 adalah 1 buah KSP dengan realisasi sebesar 1 buah KSP dengan total capaian menjadi 3 KSP (11,53 %). Demikian juga pada tahun 2020 dilakukan penanganan dengan target sebanyak 4 KSP dengan realisasi sebanyak 4 KSP. Selanjutnya Seluruh KSP ini telah tersusun draft Ranperda-nya dan dalam rencana akan dilegalisasi pada tahun 2021, tetapi berkaitan dengan UU Cipta Kerja maka seluruh KSP Kewenangan



Provinsi di hapus sehingga tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan KSP.

- B. Analisis progam, anggaran (alokasi dan realisasi) dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang, Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang. Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis **“Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang”** sebesar 0%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT belum berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Sasaran 8 (delapan) mencakup 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Indeks Resiko Bencana	Poin	140,89	142,52	139,23	102,30	135	103,13
Capaian Sasaran					102,30		

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

- A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Risiko Bencana

a. Capaian Target Indeks Risiko Bencana

Pada tahun 2022 target Indeks Risiko Bencana sebesar 142,52 poin, dengan realisasinya sebesar 139,23 poin. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 140,89 poin, maka capaian indeks risiko bencana di tahun 2022 sebesar 102,30%. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD 2023 sebesar 135 poin maka capaiannya sebesar 103,13%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Risiko Bencana telah mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2022, yaitu :

1. Upaya pemerintah provinsi dalam penguatan kapasitas baik SDM Aparatur, masyarakat dan sarana prasarana dengan memanfaatkan unsur pentaheliks.
2. Hasil penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi didapatkan dari rata-rata IRB Kabupaten/Kota dengan penilaiannya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB telah menerima nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2022 di tingkat kabupaten/kota.
3. Nilai IKD yang dikumpulkan telah dilakukan verifikasi bertahap, dimulai oleh BPBD Provinsi dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB. Nilai IKD yang sudah dilakukan verifikasi dapat dilihat pada tautan http://bit.ly/IKD_Nusa_Tenggara_Timur.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program penanggulangan bencanayang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim” sebesar 102,30%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 program oleh 1 perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.008.153.464,- dan realisasi sebesar Rp. 1.750.745.234,- atau mencapai 87,18%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT sangat berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

Misi 4 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi empat diukur dengan capaian pada 3 (tiga) sasaran yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat diukur melalui tiga indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Angka Melek Huruf	%	93,85	98,47	94,63	96,10	100	96,10
2.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,69	8,65	7,70	89,02	9,50	81,50
3.	Harapan Lama sekolah	Tahun	16,41	14,6	13,21	90,48	15	88,06
Rata-rata Capaian Sasaran						91,87		

Sumber data: BPS NTT, 2023

A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1 Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya (selain huruf latin) yang masing-masing merupakan keterampilan dasar yang diajarkan di kelas-kelas awal jenjang pendidikan dasar. Angka Melek Huruf dihitung berdasarkan hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menggambarkan data tentang kesejahteraan rumah tangga serta keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mencakup antara lain, pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli.

Tabel
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021-2022

Sumber Data: BPS NTT, 2023

Kelompok Umur Age Group	Perkotaan Urban		Perdesaan Rurals		Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15–19	100,00	100,00	99,31	99,38	99,50	99,54
20–24	99,65	99,80	97,84	98,67	98,38	98,99
25–29	99,06	98,77	98,43	98,62	98,61	98,66
30–34	98,79	99,22	96,93	97,32	97,40	97,81
35–39	99,31	99,62	95,77	95,61	96,65	96,68



a. Capaian Target Angka Melek Huruf

Berdasarkan SUSENAS 2021, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf di Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 94,63 atau mengalami kenaikan (0,78) % dari tahun 2021 yang mencapai 93,85. Realisasi tersebut belum memenuhi target RPJMD tahun 2022 yaitu 98,47 dengan capaian 96,10. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100 % maka capaiannya sebesar 96,10%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Data ini menunjukkan Provinsi NTT hingga tahun 2022 belum terbebas dari buta aksara, masih terdapat 5,37 % penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di NTT yang belum dapat membaca dan menulis. Kontribusi terbesar tidak tercapainya target kinerja berasal dari kelompok umur 50 tahun ke atas sebesar 85,37 %. Terdapat 14,63 % penduduk usia 50 tahun ke atas tidak dapat membaca dan menulis, sementara penduduk dengan usia 50 tahun ke atas sudah berada pada jenjang usia angkatan kerja bukan di jenjang usia sekolah. Kecenderungan kelompok usia 50 tahun ke atas untuk “*relapse*” menjadi buta aksara permanen sangat besar. Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya dampak program kejar paket A dan paket B yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT serta Paket C yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Materi paket A, B dan C belum cukup fungsional atau “*related*” pada aktivitas produktif sehari-hari dari peserta. Selanjutnya kontribusi belum tercapainya angka melek huruf di NTT diberikan juga oleh penduduk usia sekolah yang mengalami *drop out* sebesar 48.423 orang di tahun 2022. Pada akhirnya kondisi ini tentu memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memilih bentuk intervensi atau strategi yang kontekstual dan realistis dalam upaya mengurangi ketimpangan angka melek huruf sebesar 5,37 % di NTT dan atau mengejar angka melek huruf 100 persen di akhir periode RPJMD Tahun 2023.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat

pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (United Nations Development Programme) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

a. Capaian Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebesar 7,70 tahun, atau mengalami kenaikan 0,01 dari tahun 2021 yang mencapai 7,69 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 8,65 tahun maka terdapat 0,95 tahun dan atau gap sebesar 1,8 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 9,5 tahun. Capaian ini merupakan kontribusi RLS semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2021	2022	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	6,84	6,85	0,24
2	Sumba Timur	7,32	7,33	0,01
3	Kupang	7,39	7,41	0,02
4	Timor Tengah Selatan	6,74	6,76	0,02
5	Timor Tengah Utara	7,96	7,97	0,01
6	Belu	7,36	7,38	0,01
7	Alor	8,42	8,43	0,01
8	Lembata	8,23	8,25	0,02
9	Flores Timur	7,72	7,79	0,07
10	Sikka	6,95	6,96	0,01
11	Ende	8,03	8,09	0,06
12	Ngada	8,53	8,54	0,01
13	Manggarai	7,61	7,62	0,01
14	Rote Ndao	7,71	7,76	0,05
15	Manggarai Barat	7,56	7,80	0,24
16	Sumba Tengah	6,47	6,73	0,26
17	Sumba Barat Daya	6,35	6,37	0,02
18	Nagekeo	7,90	7,91	0,01
19	Manggarai Timur	7,35	7,42	0,07
20	Sabu Raijua	6,66	6,77	0,01
21	Malaka	7,10	7,12	0,02
Kota				
1	Kota Kupang	11,6	11,61	0,55
Nusa Tenggara Timur		7,69	7,70	0,01

Sumber Data: BPS NTT, 2023

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Capaian RLS penduduk di NTT di 2021 sebesar 7.69 tahun telah menjadi 7.70 tahun dalam 2022 sebenarnya masih berada jauh di bawah standar 15 tahun yang dianjurkan PBB. Kenyataan ini konsisten dengan temuan bahwa angkatan kerja NTT didominasi oleh lulusan SD. Ini berarti jumlah tamatan SD yang melanjutkan ke SMP juga tidak banyak sehingga kecenderungan ini akan mengerucut ke atas. Data ini menunjukkan adanya celah cukup besar di antara APK dan APM bagi anak dan pemuda di NTT yang harus diintervensi pemerintah. Terutama bagi kelompok usia yang dapat memenuhi 15 tahun RLS di NTT.

3. **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka HLS dan RLS: merupakan dua komponen utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mewakili dimensi pendidikan. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA di NTT mengalami peningkatan. Secara langsung, ketika tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA meningkatkan maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. HLS Provinsi NTT merupakan kontribusi HLS kabupaten/kota yang dapat digambarkan tahun 2021 dan 2022 pada tabel berikut.

Tabel 28
Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2021	2022	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	13,12	13,15	0,03
2	Sumba Timur	12,83	12,85	0,02
3	Kupang	13,86	13,88	0,02
4	Timor Tengah Selatan	12,58	12,60	0,02
5	Timor Tengah Utara	13,32	13,34	0,02
6	Belu	12,28	12,30	0,02
7	Alor	12,24	12,27	0,03
8	Lembata	12,43	12,45	0,02
9	Flores Timur	12,92	12,94	0,02
10	Sikka	13,43	13,44	0,01
11	Ende	13,79	13,81	0,02
12	Ngada	12,71	12,73	0,02
13	Manggarai	13,69	13,70	0,01
14	Rote Ndao	13,19	13,21	0,02



No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2021	2022	
Kabupaten				
15	Manggarai Barat	12,29	12,31	0,02
16	Sumba Tengah	13,04	13,12	0,02
17	Sumba Barat Daya	13,07	13,09	0,02
18	Nagekeo	12,49	12,51	0,02
19	Manggarai Timur	12,26	12,30	0,04
20	Sabu Raijua	13,15	13,17	0,01
21	Malaka	12,79	12,81	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	16,41	16,43	0,02
Nusa Tenggara Timur		13,20	13,21	0,01

Sumber Data: BPS NTT, 2023

a. Capaian Target Harapan Lama Sekolah

HLS Provinsi NTT pada tahun 2022 sebesar 13,21 tahun, naik 0,01 dibanding capaian tahun 2021 yaitu 13,20. Realisasi tahun 2022 belum mencapai target RLS tahun 2022 sebesar 14,61 tahun. Pada akhir RPJMD diharapkan angka HLS dapat mencapai 15 tahun sehingga perlu upaya mengejar ketertinggalan 1,79 tahun.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Data ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun di NTT yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,21 tahun atau setara dengan Diploma I. kontribusi terbesar tidak tercapainya target HLS tahun 2022 disumbang oleh angka HLS Kabupaten Alor, Belu dan Manggarai Timur sebesar 12,27-12,30.

B. Analisis Program dan anggaran dan perangkat daerah yang menunjang pencapaian target kinerja.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 7 (tujuh) Program dengan dukungan anggaran sebesar: Rp. 896.632.093.057 (*delapan ratus Sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta Sembilan puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah*). Realisasi Rp. 357.264.417.324 atau mencapai 39,84% dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, melalui 7 (tujuh) program dengan rinciannya sebagai berikut:

Table
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengelolaan Pendidikan	887.866.269.007	350.217.229.261	39,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengembangan Kurikulum	897.681.500	184.840.200	20,59	
3.	Pengembangan Kebudayaan	2.316.234.300	1.962.665.913	84,73	
4.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.763.447.250	2.489.447.250	90,08	
5.	Pembinaan Sejarah	100.001.300	98.170.000	98,16	
6.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	430.558.800	397.655.300	92,35	
7.	Pengelolaan Permuseuman	2.257.900.900	1.914.409.400	84,78	
	Jumlah	896.632.093.057	357.264.417.324	39,84	

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2022

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran “Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat” sebesar **91,87** % dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui dua indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	2022			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,15	68,8	67,47	98,06	69	97,78
2.	Prevalensi Stunting	%	20,9	16,7	17,7	88,70	10-12	35,59
Rata-rata Capaian Sasaran						93,38		

Sumber data: BPS NTT, 2023

A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen pembentuk IPM sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang Tahun ke-X. UHH Provinsi NTT merupakan kontribusi UHH Kabupaten/Kota di NTT sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Umur Harapan Hidup Life Expectancy At Birth (Year)	
	2021	2022
Sumba Barat	67,12	67,35
Sumba Timur	65,16	65,38
Kupang	64,91	65,28
Timor Tengah Selatan	66,46	66,68
Timor Tengah Utara	67,09	67,35
Belu	64,89	65,28
Alor	61,64	61,99
Lembata	67,20	67,52
Flores Timur	65,31	65,62
Sikka	67,45	67,86
Ende	65,43	65,76
Ngada	68,12	68,40
Manggarai	67,11	67,38
Rote Ndao	64,88	65,26
Manggarai Barat	67,46	67,73
Sumba Tengah	68,42	68,65
Sumba Barat Daya	68,57	68,79
Nagekeo	67,25	67,56
Manggarai Timur	68,07	68,29
Sabu Raijua	60,66	60,87
Malaka	65,01	65,34
Kota/Municipality		
Kota Kupang	69,73	70,11
Nusa Tenggara Timur	67,15	67,47

Sumber Data: BPS NTT, 2023

a. **Capaian Target Usia Harapan Hidup (UHH)**

UHH masyarakat Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah 67,47 tahun atau mencapai 97,78 % dari target akhir RPMJD yaitu 69 tahun dan mengalami kenaikan 0,32 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 67,15 tahun. Namun demikian realisasi ini masih mengalami selisih 1,33 dari target 2022 yaitu 68,8 tahun. Angka UHH Provinsi NTT tahun 2022 berada pada urutan 28 dari 33 Provinsi serta ikut berkontribusi pada angka UHH nasional tahun 2022 sebesar 72,14 tahun.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk



meningkatkan UHH melalui program peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lintas susunan pemerintahan ditandai dengan naiknya UHH sebesar 0,32 poin di tahun 2022 dibandingkan realisasi tahun 2021. Hal ini membuktikan masyarakat NTT mampu bertahan di masa krisis kesehatan dunia selama pandemi Covid-19 berlangsung sejak 2020 sampai akhir 2022 sekaligus menjadi penyebab melambatnya laju pertumbuhan angka UHH Provinsi NTT di dua tahun terakhir.

2. Prevelensi Stunting

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Prevelensi stunting Provinsi NTT merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota di NTT sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Prevelensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Stunting Stunted	Presentase Stunting Stunting Percentage
Kabupaten/ agency	2 611	23,3
Sumba Barat	3 478	14,9
Sumba Timur	6 118	19,9
Kupang	11 642	28,3
Timor Tengah Selatan	5 280	24,4
Timor Tengah Utara	2 473	13,7
Belu	2 119	11,7
Alor	1 398	16,0
Lembata	3 412	18,7
Flores Timur	3 174	13,8
Sikka	1 749	8,9
Ende	1 027	9,3
Ngada	4 313	16,2
Manggarai	3 011	22,3
Rote Ndao	3 675	15,9
Manggarai Barat	659	8,7
Sumba Tengah	8 270	24,3
Sumba Barat Daya	946	8,4
Nagekeo	2 408	9,6
Manggarai Timur	1 496	18,1
Sabu Raijua	2 582	15,9
Malaka		
Kota/Municipality		
Kota Kupang	5 497	2,15
Nusa Tenggara Timur	77 338	17,7

Sumber Data: BPS NTT, 2023



a. Capaian Target Prevalensi Stunting

Prevelensi stunting tahun 2022 di Provinsi NTT adalah 17,7% atau mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 3,2 % dibanding capaian tahun 2021 yaitu 20,9 %. Namun capaian ini masih jauh dari target akhir RPJMD yakni 10-12 %, artinya perlu mengejar gap minimal 7,7-5,7 % di tahun 2023. Rata-rata penurun angka stunting di NTT dalam dua tahun terakhir sebesar 3 % per tahun turut berkontribusi menurunkan angka stunting nasional tahun 2022 yang berada pada angka 21,6% dari 24,4% di tahun 2021. Angka stunting provinsi NTT berada di bawah angka stunting nasional.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan penurunan prevelensi stunting di Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berbagai upaya kolaborasi dengan multi level pemerintahan dan multi stakeholder.

B. Analisis Program dan anggaran dan perangkat daerah yang menunjang pencapaian target kinerja.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) Program dengan anggaran sebesar: Rp. 184.868.113.670 (*seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Realisasi Rp. 157.033.866.122 atau mencapai 84,94 % sampai dengan akhir tahun dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.800.134.167	136.730.289.046	87,20	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.067.979.503	20.273.577.076	72,23	
	Jumlah	184.868.113.670	157.033.866.122	84,94	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran “Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat” sebesar **93,38 %** dengan kategori sangat berhasil.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi keolahragaan diukur melalui capaian satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Cakupan pembinaan Kepemudaan dan keolahragaan	%	71,08	70	74,68	106,68	80	93,35
Capaian Sasaran					106,68		

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.NTT, 2023

A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

Peran pemuda dalam pembangunan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

a. Capaian Target Cakupan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

Pada tahun 2022 cakupan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan adalah sebesar 74,68% atau terealisasi 106,68 % dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,60% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 80%, maka cakupan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan mencapai 88,85%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pada tahun 2020 jumlah asosiasi kepemudaan yang dibina oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 50 Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). Pembinaan OKP tahun 2021 dan 2022 tidak dilaksanakan karena tidak ada intervensi

anggaran, sehingga tidak ada penambahan jumlah OKP yang dibina tahun 2022 atau tetap berjumlah 50 OKP. Sedangkan untuk cabang olahraga (CABOR) yang dibina di tahun 2022 berjumlah 9 (Kempo, Pencak Silat, Tinju, Atletik, Karate, Taekwondo, Muaythai, Tarung derajat, Wushu). Adapun total OKP dan CABOR yang menjadi target pembinaan berjumlah 79, dengan rincian total asosiasi kepemudaan 70 dan total cabang olahraga 9 CABOR.

B. Analisis Program, kegiatan dan anggaran (alokasi dan realisasi) dan perangkat daerah yang menunjang pencapaian target kinerja.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) Program dan dengan dukungan anggaran sebesar: Rp. 32.039.705.600 (*tiga puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah*). Realisasi Rp. 30.950.889.810 atau mencapai 96,60% sampai dengan akhir tahun dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel Program, anggaran dan realisasi					
No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.480.000.000	1.302.292.377	87,99	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	29.559.705.600	28.648.597.433	96,91	
3.	Pengembangan Kapasitas kepramukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	100	
	Jumlah	32.039.705.600	30.950.889.810	96,60	

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran “ Meningkatkan Kualitas pemuda dan Prestasi Keolahragaan” sebesar **106,68%** dengan kategori sangat berhasil.

Misi 5 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju

manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keberhasilan pelaksanaan misi kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT tahun 2018-2023 diukur dengan pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Sasaran strategis tersebut mencakup tujuh (7) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja Misi 5 RPJMD 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2021	2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,50	69	63,10	91,44	71	88,87
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	63.72 (Predikat B)	80-90 (Predikat A)	63,65 (Predikat B)	79,56	80 -90 (Predikat A)	99,45
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2.28	2,5	3,35	134	2.7	124,07
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	77,10	60	76,99	128,31	75	102,65
6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik/IKM	Poin	86.39	90	85,82	95,36	90	95,35
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	73,42	82.50	73,42	88,99	83	88,45
Rata-rata Capaian Sasaran						102,52		

Sumber data: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, BPS NTT, Badan Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Capaian target Indeks Reformasi Birokrasi

Target nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 69, dengan realisasi sebesar 63,10 atau mencapai 91,45% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 61,50, maka terdapat peningkatan sebesar 1,6 poin atau 2,06%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir (2023) RPJMD sebesar

71, maka terdapat gap sebesar 7,9 poin atau nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai 88,73%.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala terhadap *Road Map* RB dan rencana kerja yang disusun sehingga capaian maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sulit diketahui.
- 2) Belum dilakukan penyesuaian kelembagaan sesuai regulasi terbaru sehingga kelembagaan yang ditata masih harus dilakukan penataan menyesuaikan regulasi yang berlaku.
- 3) Evaluasi atas SOP dan Proses Bisnis belum dilakukan secara berkala sehingga belum mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
- 4) Pemerintah Provinsi NTT belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang baik
- 5) Belum memiliki kebijakan berkaitan dengan manajemen talenta.
- 6) Kinerja belum dicascading secara baik sampai level bawah
- 7) Monitoring secara berkala terhadap tingkat kepatuhan belum dilakukan.

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. Capaian Target Opini BPK

Target opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berhubung sampai dengan bulan Maret tahun 2023 BPK belum mengeluarkan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022, maka dalam analisis ini digunakan data realisasi tahun 2021 yaitu WTP. Jika

menggunakan data realisasi tahun 2021 tersebut, maka target tahun 2022 tercapai sebesar 100% (opini WTP), jika dibandingkan dengan target WTP pada tahun terakhir (2023) RPJMD, capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 telah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan agar target pada tahun 2023 tersebut dapat tercapai.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- 2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- 3) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat , yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.
- 4) Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencakup aspek kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Target Nilai Akuntabilitas Kinerja

Target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 adalah 80 (Predikat A) dengan

realisasi sebesar 63,65 (predikat B) atau mencapai 79,56% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 63,72 maka capaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dengan gap sebesar 0,07 poin atau -0,10%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir (2023) RPJMD sebesar 80, maka terdapat gap sebesar 16,35 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Rumusan tujuan dan sasaran kinerja level Pemerintah Provinsi yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi dan Rencana Strategis Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi pada *outcome*.
- 2) Masih terdapat indikator kinerja di level pemerintah daerah dan perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup.
- 3) Penjenjangan kinerja yang telah disusun di level pemerintah daerah dan Perangkat Daerah belum sesuai dengan kaidah yang terdapat di dalam Permenpan dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.
- 4) Belum terdapat pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun PD.
- 5) Aplikasi *e Monev Performance* belum sepenuhnya dapat progress capaian strategis daerah maupun PD.
- 6) Rumusan indikator kinerja yang belum memiliki definisi operasional, formula perhitungan serta penanggung jawab data.
- 7) Laporan kinerja belum membandingkan antara capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun tahun sebelumnya dan target

kinerja akhir periode Renstra untuk melihat tren capaian target kinerja.

- 8) Laporan kinerja belum menjelaskan secara spesifik dan mendalam terkait faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya setiap target.
- 9) Perlu peningkatan ketajaman dalam melakukan evaluasi dan penyimpulan hasil penilaian serta perlu dilakukan monitoring terhadap RATL secara intensif dan sistematis.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Capaian Target Indeks SPBE

Target nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 2,5, dengan realisasi sebesar 3,35 atau mencapai 134% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 2,28, maka terdapat peningkatan sebesar 1,07 poin atau 46,92%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir (2023) RPJMD sebesar 2,7, maka capaian tahun 2022 telah melampaui sebesar 0,65 poin atau 124,07% sehingga Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Telah tersedianya instrumen regulasi terkait rancangan pembangunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyelaraskan pembangunan SPBE pada instansi Perangkat Daerah
- 2) Beberapa aplikasi umum berbagai pakai mulai diterapkan secara maksimal dan terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain bidang perencanaan dan penganggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, bidang kepegawaian, bidang perizinan dan pengaduan masyarakat.

- 3) Penerapan aplikasi khusus terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain sistem absensi elektronik, tata naskah dinas elektronik (e-nadi) dan penggunaan tanda tangan elektronik sudah diimplementasikan.
- 4) Telah adanya regulasi yang mengatur terkait peta proses bisnis, infrastruktur, data dan informasi, layanan aplikasi serta keamanan SPBE.
- 5) Penerapan SPBE telah menjadi indikator penting dalam mendukung area perubahan tata laksana Reformasi Birokrasi yang transparan, efektif, efisien dan terukur.
- 6) Adanya peran kerja kolaboratif antara perangkat daerah dan Dinas Kominfo dalam penerapan SPBE.

5. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

a. Capaian Target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 60, dengan realisasi sebesar 76,99 atau mencapai 128,31% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 77,10, maka capaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dengan gap sebesar 0,11 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir (2023) RPJMD sebesar 75, maka terdapat gap sebesar 1,99 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya upaya sosialisasi dan advokasi kepada badan publik dan Perangkat Daerah untuk membuka akses informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 2) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
- 3) Meningkatnya upaya badan publik dan Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sehingga masyarakat mengetahui pembangunan yang dilakukan Pemerintah dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut.
- 5) Meningkatnya kesadaran dari setiap Perangkat Daerah untuk mempublikasikan Program dan Kegiatan serta capaiannya pada masing-masing *website*.

6. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

a. Capaian Target Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target nilai IKM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 90, dengan realisasi sebesar 85,82 atau mencapai 95,36% dari target. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 86,39, maka capaian tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dengan gap sebesar 0,57 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir (2023) RPJMD sebesar 90, maka terdapat gap sebesar 4,18 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit penyelenggara layanan publik

- 2) SPP yang telah ditetapkan belum publikasikan secara maksimal, terutama melalui website.
- 3) Kualitas sarana dan prasarana pada unit penyelenggara layanan publik belum memadai.
- 4) Kompetensi dan profesionalisme pelaksana pada unit penyelenggara layanan publik masih rendah.

7. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

a. Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sebesar 82,50. Berhubungan sampai dengan bulan Maret tahun 2023 BPS belum merilis data IDI tahun 2022, maka dalam analisis ini digunakan data capaian tahun 2021 sebesar 73,42. Jika menggunakan data realisasi tahun 2021 tersebut, target tahun 2022 tercapai sebesar 88,99%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir (2023) RPJMD sebesar 83, maka terdapat gap sebesar 9,58 poin.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.
- 3) Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pemenuhan

kebutuhan akan akses terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, Angka Partisipasi Murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga masih rendah.

- 4) Kinerja lembaga legislatif berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena jumlah Peraturan Daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.
- 5) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi APBD berupa Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di website Pemerintah Provinsi NTT.
- 6) Pendidikan politik bagi kader partai politik berada pada kategori rendah, hal disebabkan karena masih rendahnya prevalensi kegiatan pendidikan politik bagi kader yang dilakukan oleh partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD. Parpol-parpol tersebut tidak banyak melakukan kegiatan kaderisasi.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari Misi kelima RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 26 Program pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 18 Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.
Jumlah Program, Jumlah dana (alokasi dan realisasi)
Menurut Perangkat Daerah

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,501,988,200.00	1,426,899,400.00	95.00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,591,470,329.00	1,351,300,293.00	84.91
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	257,213,700.00	218,613,061.00	84.99
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	184,796,000.00	102,568,000.00	55.50
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,973,273,880.00	1,913,586,280.00	96.98
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Poltik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2,970,773,000.00	2,791,490,550.00	93.97
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	117,963,200.00	70,268,300.00	59.57
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	320,624,300.00	270,470,000.00	84.36
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penangan Konflik Sosial	4,877,569,200.00	4,701,991,305.00	96.40
3	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,721,639,751.00	3.652.831.000.00	98,15
		Program Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi	1,040,652,600.00	1.039.819.750.00	99,92
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	727,284,700.00	636,247,242.00	86,11
		Program Kesejahteraan Rakyat	23,418,748,300.00	13,115,547,924.00	56,00
5	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,814,488,700.00	1,503,437,456.00	82,85
6	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Program Perekonomian dan Pembangunan	796,298,600.00	691,102,217.00	86,78
		Program Administrasi Pembangunan	206.946.300.00	174,006,806.00	84,08
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	6,589,605,381.00	6,443,311,641.00	97,78
8	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Program Penataan Organisasi	1,844,334,550.00	1,738,955,738.00	94,29

9	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,429,807,200.00	3,265,916,872.00	95,22
10	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,772,823,730.00	59,473,648,921.00	94,77
11	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	81,298,393,360.00	70,893,165,691.00	87,20
12	Bappelitbang da Provinsi NTT	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,103,846,531.00	1,620,945,359.00	77,05
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3,701,288,172.00	2,983,938,844.00	80,62
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	870,414,227.00	558,011,104.00	64,11
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Program Kepegawaian Daerah	2,859,174,098.00	2,724,091,950.00	95,27
14	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	803,597,495,520.00	589,097,539,943.24	73,31
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,293,796,100.00	1,184,793,579.00	91,57
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,264,749,031.00	1,878,969,095.00	57,55
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18,531,484,846.00	17,156,734,484.00	92,58
16	Badan Pengembang an SDM Daerah Provinsi NTT	Program Pengembangan SDM	34,169,028,183.00	29,183,266,754.00	85,40
17	Badan Penghubung Provinsi NTT	Program Pelayanan Penghubung	610,408,300.00	594,508,961	97,40
18	Badan Perbatasan Provinsi NTT	Program Pengelolaan Perbatasan	137,793,600.00	137,793,600.00	100,00
Jumlah			1,072,596,173,589	822,627,747,623	76,70

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif”** sebesar 102,52%”. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 26 program oleh 18 Perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,072,596,173,589.00 dan realisasi Rp. 822,627,747,623.00 atau mencapai 76,70%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTT berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi kelima RPJMD 2021-2023.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 sesuai misi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel
Capaian Kinerja Menurut Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022

NO	MISI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SKALA ORDINAL
1.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	71,79	Cukup Berhasil
2.	Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	82,49	Berhasil
3.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan	72,58	Cukup Berhasil
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	97,51	Sangat Berhasil
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	102,52	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN		85,374	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemprov NTT selama Tahun 2021 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target 55 (*lima puluh lima*) indikator kinerja, 21 (*Dua Puluh satu*) sasaran dari 5 (Lima) Misi.

3.3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan memuat tentang analisis penggunaan sumber daya keuangan yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

1. Efektivitas penggunaan anggaran

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi enggaran belanja dengan Target anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efektivitas belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
- c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
- d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
- e. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

**Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran
Pada 39 Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Tahun 2022**

NO	Nama Perangkat Daerah	Target Anggaran Bealaja	Realisasi Anggaran Belanja	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.866.587.011.708,00	1.717.400.050.135,10	92,01	Efektif
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	336.812.297.380,00	269.670.361.328,94	80,07	Cukup Efektif
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	219.700.350.297,00	187.008.380.093,00	85,12	Cukup Efektif
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	92,03	Efektif
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.909.016.600,00	13.003.743.989,00	87,22	Cukup Efektif
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.507.021.764,00	7.461.169.450,00	87,71	Cukup Efektif
7	Dinas Sosial	67.893.028.960,00	56.019.781.213,34	82,51	Cukup Efektif
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	81,13	Cukup Efektif
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	85,13	Cukup Efektif
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.616.024.678,00	35.176.964.389,00	96,07	Efektif
11	Dinas Perhubungan	54.599.528.927,00	50.818.077.556,00	93,07	Efektif
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.827.913.617,00	26.310.872.086,00	80,15	Cukup Efektif
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.138.042.030,00	8.436.650.354,00	83,22	Cukup Efektif
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	44.825.123.996,00	41.718.662.674,00	93,07	Efektif
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.075.898.980,00	11.718.294.475,00	83,25	Cukup Efektif

16	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.453.248.701,00	45.821.665.542,00	92,66	Efektif
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.856.590.213,00	11.013.006.205,00	85,66	Efektif
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.678.051.849,00	55.037.362.700,00	89,23	Efektif
19	Dinas Peternakan	39.581.544.655,00	30.137.832.467,00	76,14	Cukup Efektif
20	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20.798.964.243,00	18.377.971.302,00	88,36	Efektif
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.821.831.170,00	17.555.022.828,00	93,27	Cukup Efektif
22	Sekretariat Daerah	141.710.544.979,00	121.402.153.601,00	85,67	Efektif
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	167.010.158.939,00	152.870.737.674,00	91,53	Kurang Efektif
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.200.669.532,00	17.185.390.424,00	77,41	Kurang Efektif
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	113.683.187.084,00	81.681.285.135,36	71,85	Cukup Efektif
26	Badan Keuangan Daerah	822.121.307.946,00	641.493.787.786,24	78,03	Cukup Efektif
27	Badan Kepegawaian Daerah	13.411.602.898,00	11.543.168.262,00	86,07	Cukup Efektif
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.137.205.218,00	40.887.845.232,00	81,55	Efektif
29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.425.567.242,00	4.838.438.149,00	89,18	Efektif
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.351.660.000,00	7.625.631.025,00	91,31	Efektif
31	Inspektorat Daerah	17.921.823.451,00	16.172.764.712,00	90,24	Efektif
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.056.099.640,00	14.906.104.602,00	92,84	Efektif

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja kurang efisien.
- Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
- Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Pada 39 Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Tahun 2022**

NO	Nama Perangkat Daerah	Target Anggaran Bealaja	Realisasi Anggaran Belanja	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.866.587.011.708,00	1.717.400.050.135,10	92,01	Kurang Efisien
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	336.812.297.380,00	269.670.361.328,94	80,07	Cukup Efisien
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	219.700.350.297,00	187.008.380.093,00	85,12	Cukup Efisien
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	92,03	Kurang Efisien
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.909.016.600,00	13.003.743.989,00	87,22	Cukup Efisien
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.507.021.764,00	7.461.169.450,00	87,71	Cukup Efisien
7	Dinas Sosial	67.893.028.960,00	56.019.781.213,34	82,51	Cukup Efisien
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	81,13	Cukup Efisien
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	85,13	Cukup Efisien
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.616.024.678,00	35.176.964.389,00	96,07	Kurang Efisien
11	Dinas Perhubungan	54.599.528.927,00	50.818.077.556,00	93,07	Kurang Efisien
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.827.913.617,00	26.310.872.086,00	80,15	Cukup Efisien
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.138.042.030,00	8.436.650.354,00	83,22	Cukup Efisien
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	44.825.123.996,00	41.718.662.674,00	93,07	Kurang Efisien
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.075.898.980,00	11.718.294.475,00	83,25	Cukup Efisien
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.453.248.701,00	45.821.665.542,00	92,66	Kurang Efisien
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.856.590.213,00	11.013.006.205,00	85,66	Cukup Efisien
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.678.051.849,00	55.037.362.700,00	89,23	Cukup Efisien
19	Dinas Peternakan	39.581.544.655,00	30.137.832.467,00	76,14	Cukup Efisien
20	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20.798.964.243,00	18.377.971.302,00	88,36	Cukup Efisien
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.821.831.170,00	17.555.022.828,00	93,27	Kurang Efisien
22	Sekretariat Daerah	141.710.544.979,00	121.402.153.601,00	85,67	Cukup Efisien

23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	167.010.158.939,00	152.870.737.674,00	91,53	Kurang Efisien
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.200.669.532,00	17.185.390.424,00	77,41	Efisien
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	113.683.187.084,00	81.681.285.135,36	71,85	Efisien
26	Badan Keuangan Daerah	822.121.307.946,00	641.493.787.786,24	78,03	Cukup Efisien
27	Badan Kepegawaian Daerah	13.411.602.898,00	11.543.168.262,00	86,07	Cukup Efisien
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.137.205.218,00	40.887.845.232,00	81,55	Cukup Efisien
29	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.425.567.242,00	4.838.438.149,00	89,18	Kurang Efisien
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.351.660.000,00	7.625.631.025,00	91,31	Kurang Efisien
31	Inspektorat Daerah	17.921.823.451,00	16.172.764.712,00	90,24	Kurang Efisien
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.056.099.640,00	14.906.104.602,00	92,84	Kurang Efisien